

Sastra Punya Peran Politik yang Subversif

Sekitar sepuluh tahun yang lalu — persisnya Oktober 1985 — kalangan kesenian diributkan oleh perdebatan tentang apa yang disebut "sastra kontekstual". Pencetusnya adalah Ariel Heryanto, yang mengkampanyekan gagasan itu dalam sebuah acara sarasehan sastra di Gedung Monumen Pers Nasional (MPN) Solo.

Bisa Anda ceritakan kembali, apa sebenarnya latar belakang munculnya gagasan tersebut?

Saya kira ramainya perdebatan tentang sastra kontekstual itu menunjukkan adanya pluralisme, kemajemukan nilai-nilai sastra. Jelasnya begini, waktu itu banyak sekali pengamat sastra merasakan bahwa nilai sastra yang baik dan bagus itu kurang lebih sama untuk karya sastra macam apapun.

Misalnya, karya sastra yang baik harus menampilkan keindahan. Apa yang dinamakan "indah" itu, kurang lebih abadi dan sama dari segala macam bangsa dan zaman. Contoh yang lain, misalkan, sastra harus menjelaskan kebenaran. Dan apa yang dimaksud dengan "kebenaran" itu, kira-kira sama dengan kebenaran yang dimaksud para ilmuwan. Dengan adanya anggapan semacam itu, terjadi penunggalan atau pengasastunggalan nilai-nilai sastra untuk segala macam jenis masyarakat di segala zaman. Saya termasuk salah satu yang tidak setuju dengan pandangan tersebut.

Nah, sastra kontekstual bukan penggagas utama dan pertama. Saya hanya membangkitkan kembali minat orang, bahwa nilai itu lebih dari satu. Yang namanya indah, benar itu tergantung konteksnya. Di sini yang dimaksud konteks adalah, terutama masyarakatnya. Jadi, yang namanya "indah" untuk orang Jawa, belum tentu "indah" bagi orang Irian. Sama-sama Jawanya, Jawa zaman Mataram dengan Jawa zaman sekarang sudah lain. Jadi, kepekaan dan kemajemukan berkonteks itu memberi peluang pada pluralitas penghargaan terhadap karya sastra. Kira-kira begitu isi pikiran yang saya kemukakan.

Kebetulan waktu itu ada sarasehan kesenian di Solo. Tepatnya, di gedung monumen Pers, Oktober 1985 lalu. Ada sejumlah makalah disajikan. Saya bersama Arief (Dr. Arief Budiman, — red) kebagian bicara soal sastra. Kebetulan juga, saya sama Arief mempunyai gagasan sama tentang sastra kontekstual.

Bagaimana Anda menilai kembali gagasan itu sekarang ini?

Gagasan tentang sastra kontekstual itu sendiri sebenarnya tidak cemerlang. Biasa-biasa saja. Tapi, berhubung ada reaksi dari banyak orang, akhirnya gagasan itu jadi tampak luar biasa. Mengapa reaksinya ramai? Kebetulan saja konteksnya pas sekali. Kami sekadar mengemukakan gagasan mengenai adanya relativisme dalam nilai, khususnya nilai sastra. Sebenarnya, ide yang sama sudah dilontarkan orang lain. Dalam tradisi Eropa, misalnya, realitisme ini bahkan berkembang menjadi filsafat tersendiri. Pada tradisi Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan Jawa, relativisme juga sangat kuat dan mempunyai tempat.

Dalam kesenian wayang, definisi baik itu tidak hanya satu. Tokoh-tokoh *punakawa* mempunyai nilai kebaikan yang berbeda dengan Arjuna. Dan itu tidak bisa digabung. Artinya, para *punakawan* tidak harus seperti Arjuna yang berpenampilan halus.

Jadi sastra kontekstual mengkampanyekan pluralitas nilai?

Jelas dong. Kita percaya pada pluralitas. Ini karena penunggalan nilai berbahaya sekali bagi kehidupan. Masalah kita adalah bahwa penunggalan ternyata dilakukan oleh banyak pihak. Ini harus dilawan. Dalam politik, apa yang dinamakan sah dan tidak sah itu ditunggalkan. Kita mencoba mengajak orang untuk menghargai pluralitas. Dalam dunia ilmu, itu jelas sekali.

Jadi inti gagasan sastra kontekstual adalah pembelaan terhadap nilai-nilai yang sampai sekarang dibenarkan dan dianggap tidak mempunyai hak hidup. Atau karena dianggap tidak sesuai dengan yang sedang berjaya. Itu saja. Kita mencoba untuk menghargai nilai-nilai yang berbeda.

Anda menolak adanya nilai universal sastra dan menganggap karya sastra semacam itu terlalu elitis. Bagaimana itu?

Kita tidak percaya pada suatu nilai apapun yang dianggap universal, berlaku di luar bangunan kehidupan manusia yang riil. Manusia itu fana sekali, relatif sekali. Nilai-nilai juga begitu karena ia berasal dari respons manusia yang mempunyai nafsu, mempunyai kepentingan, ketakutan, dan sebagainya.

Pemutlakan nilai sering dilakukan oleh otoritas-

otoritas yang *established*, dan biasanya mereka terdiri dari kaum elit. Itu sebabnya, baik dalam ilmu, politik, atau sastra, mereka cenderung menguniversalkan nilai. Kasus universalisasi HAM misalnya, adalah contoh lain di mana Amerika sebagai negara adikuasa memaksakan nilai-nilainya sendiri.

Apakah gagasan sastra kontekstual harus diterjemahkan ke dalam jenis sastra politik?

Begini, dalam pandangan kita segala macam tindakan orang, masyarakat, termasuk dalam bersastra, mempunyai implikasi politik. Jadi tidak peduli, jenisnya *kayak* apa. Jadi, sastra kontekstual jelas dan sadar, bahwa ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan mempunyai implikasi politik. Tapi, sastra kontekstual tidak hanya berpolitik. Prinsipnya ia menawarkan pluralitas pandangan, pluralitas nilai. Bidangnyanya mencakup segi-segi etis, estetis, dan sebagainya.

Apa perbedaan dan persamaan antara sastra kontekstual dengan sastra yang berorientasi pada pandangan realisme-sosialis?

Jelas ada beda dan persamaannya. Sama, karena keduanya tertarik pada perubahan sosial. Bedanya, realisme-sosialis itu sebetulnya ideologi sastra yang cenderung tertutup, sementara sastra kontekstual membuka peluang bagi perbedaan. Realisme-sosialis memilih satu versi untuk dijadikan doktrin yang baku, yang kemudian diuniversalkan. Misalnya, sastra yang bagus itu harus realis. Di luar itu dianggap buruk.

Di Rusia, realisme-sosialis dijadikan semacam "Pancasila". Jadi itu hukum resminya, dogmanya. Kalau *nggak* begitu, ya *nggak* benar. Di Indonesia, realisme-sosialis memang dijadikan pegangan para sastrawan LEKRA. Tapi dari penelitian-penelitian yang dilakukan para sarjana Barat, anggota LEKRA sendiri ternyata sering mempertengkarkan paham itu.

Jadi, yang melawan realisme-sosialis itu bukan saja orang *Manifes Kebudayaan*, beberapa orang LEKRA sendiri bertengkar soal ini. Dan jangan lupa, di Indonesia banyak sekali orang yang masih berpaham Marxis yang menentang realisme-sosialis. Sampai sekarang saya *nggak* yakin orang seperti Pram itu bisa dijinakkan oleh realisme-sosialis. Dia itu liar sekali. Mustahil dijinakkan oleh apapun.

Bagaimana menurut Anda hubungan antara sastra dan politik?

Sastra itu sejenis *genre* penafsiran manusia yang berbudaya. Sejenis ungkapan manusia berbudaya mengenai pengalaman hidupnya. Jenis lainnya adalah refleksi etis, khotbah, analisa ilmiah, statistik. Itu jenis yang berbeda-beda, semuanya adalah ungkapan, karangan. Bentuk tulisannya yang meragamkannya, karena *genre*-nya berbeda-beda. Setiap *genre* mempunyai hukum berbeda. Kalau saya menulis sebuah skripsi, saya harus mematuhi kaidah-kaidah penulisan skripsi. Tentu saja tidak sama dengan penulisan novel.

Lalu di mana letak politik? Menurut saya, setiap *genre* itu mempunyai implikasi politik yang berbeda-beda. Contohnya, di zaman modern seperti sekarang, *genre* ilmu, analisa, statistik, dsb., sangat berjaya dalam pranata politik modern. Inilah *genre* / yang sangat ampuh memecah-mecah realitas sosial, memisahkan manusia dari jagatnya, memisahkan subjek dengan objek.

Dalam konteks seperti ini, sastra mempunyai peran politik yang sangat radikal dan subversif. Karena apa? Karena dia menghancurkan pemisahan antara subjek dan objek itu. Dalam hal tertentu bahkan bisa mencampur-adukkan fakta dan fiksi. Dia memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memahami realitas sosial dengan cara yang sangat liar sekali, dan berbeda dengan dunia ilmu.

Jadi di mana fungsi politik sastra? Dia memberikan alternatif untuk memahami kebenaran yang beragam, yang ditindas oleh ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan hanya dikenal satu jenis kebenaran, yaitu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Padahal di dalam alam manusia, kebenaran itu bukan hanya kebenaran ilmiah.

Apakah sastra dan ilmu bisa hidup secara otonom?

Tentu saja tidak bisa. Ada semacam ideologi dalam madzab universalisme, bahwa seni itu harus otonom. Seni itu harus bersih politik. Saya kira tidak bisa itu. Karena apa? Seni itu dibikin dalam masyarakat. Begitu saya bikin sastra, saya memakai bahasa. Bahasa itu sudah mempunyai muatan-muatan politis, dan yang bikin bahasa itu bukan saya, tapi masyarakat yang terbentuk oleh suatu proses politik. ■ edy setiyoko